SKRIPSI

PERAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DALAM PENEGAKAN ETIKA ORGANISASI PARTAI

(Studi Kasus: Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

HAFIZH

NIM: E1051211007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBARAN PERSETUJUAN

PERAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DALAM PENEGAKAN ETIKA ORGANISASI PARTAI

(Studi Kasus : Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang)

Tanggungjawab Yuridis Pada:

HAFIZH
NIM: E1051211007

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP,M.Si **Tanggal : ...**

NIP. 197408102002122002

Pembimbing Pendamping

Syarifah Nurma Afhiani M.S.Sos **Tanggal : ...**

NIP. 199306212022032011

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DALAM PENEGAKAN ETIKA ORGANISASI PARTAI

(Studi Kasus : Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang)

Oleh:

HAFIZH
NIM: E1051211007

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Waktu : 13.00 –15.00 Wib.
Tempat : Ruang Sidang Fisip Untan

Ketua	Seketaris
Dr.. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP,M.Si	Syarifah Nurma Afhiani M.Sos
NIP. 197408102002122002	NIP. 199306212022032011
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Jumadi, Sos, M.Si	Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP. 197108051997021001	NIP. 199503282022032022

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Hafizh (E1051211007). Peran Partai Nasional Demokrat Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai Studi Kasus Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang. Skripsi.Program Studi Ilmu Politik.Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.Pontianak 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam penegakan etika organisasi partai di Kabupaten Sintang, khususnya dalam konteks kasus pelanggaran etik oleh salah satu kadernya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Etika politik merupakan landasan moral yang penting dalam membentuk budaya demokrasi yang sehat dan akuntabel, di mana partai politik memiliki tanggung jawab sebagai pelaku utama dalam membangun integritas dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai NasDem belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal dalam menegakkan etika organisasi, sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai. Meskipun terdapat mekanisme formal seperti pemberhentian dan sanksi terhadap pelanggar, implementasinya masih lemah, sebagaimana terlihat dalam kasus Zulherman, anggota DPRD Kabupaten Sintang, yang tetap menjabat meski telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Partai hanya memberikan sanksi berupa penurunan jabatan tanpa mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa ketidaktegasan partai dalam menindak pelanggaran etik berdampak negatif terhadap citra partai dan melemahkan fungsi kontrol etika dalam politik lokal. Diperlukan komitmen lebih kuat dari partai politik dalam menegakkan integritas dan tanggung jawab moral dalam sistem demokrasi.

Kata kunci: Partai NasDem, Etika Politik, Korupsi.

ABSTRACT

Hafizh (E1051211007). The Role of the National Democratic Party in Enforcing Party Organizational Ethics Case Study of DPD Members of the NasDem Party in Sintang Regency. Thesis. Political Science Study Program. Department of Administrative Science. Faculty of Social and Political Sciences. Tanjungpura University. Pontianak 2025.

This study aims to examine the role of the National Democratic Party (NasDem) in upholding organizational ethics within the party in Sintang Regency, particularly in the context of an ethical violation case involving one of its members who was implicated in a corruption crime. Political ethics serve as a crucial moral foundation in shaping a healthy and accountable democratic culture, in which political parties bear the primary responsibility for fostering integrity and public trust. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews and documentation. The findings of the study indicate that the NasDem Party has not fully carried out its function optimally in enforcing organizational ethics as stipulated in the party's statutes and bylaws (AD/ART). Although there are formal mechanisms such as dismissal and sanctions for violators, their implementation remains weak, as exemplified in the case of Zulherman, a member of the Sintang Regency Regional House of Representatives (DPRD), who remained in office despite being named a corruption suspect. The party only imposed a sanction in the form of demotion without proposing an Interim Replacement (Pergantian Antar Waktu, PAW). The study concludes that the party's lack of firmness in addressing ethical violations negatively impacts its image and weakens the ethical oversight function in local politics. A stronger commitment is needed from political parties to uphold integrity and moral responsibility within the democratic system.

Keywords: NasDem Party, political ethics, corruption,

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul: “Peran Partai Nasional Demokrat Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai”. Partai NasDem menjalankan perannya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Sintang. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya tingkat korupsi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Sintang, serta pentingnya peran partai politik dalam membangun integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam mendorong pencegahan serta penanggulangan korupsi, baik melalui kebijakan internal partai, edukasi politik, maupun pengawasan terhadap kader-kadernya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Fokus utama penelitian adalah melihat implementasi komitmen antikorupsi dalam struktur dan aktivitas politik Partai NasDem di tingkat lokal. Proposal ini juga mengkaji berbagai teori yang relevan seperti teori peran, teori partai politik, dan teori sistem politik, yang digunakan untuk menganalisis data secara mendalam.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya gambaran konkret mengenai kontribusi partai politik, khususnya Partai NasDem, dalam pemberantasan korupsi di daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan sistem politik lokal yang lebih transparan dan akuntabel.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga antikorupsi telah dibentuk, praktik korupsi masih kerap terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kabupaten Sintang, sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, tidak lepas dari potensi dan risiko terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem politik demokratis. Partai bukan hanya sebagai alat pencalonan dan kendaraan politik bagi para pemimpin, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan struktural dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana partai-partai politik, khususnya Partai NasDem, melaksanakan fungsi tersebut.

Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam bagaimana kebijakan, sikap politik, dan tindakan nyata Partai NasDem di Kabupaten Sintang berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik politik antikorupsi di lingkungan partai serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam strategi serta tindakan konkret yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam upaya mendorong pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Sintang. Tujuan ini berangkat dari kesadaran bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang

bersih dan berintegritas, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga dalam lingkup politik lokal.

Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji bagaimana kebijakan internal partai dirancang dan diimplementasikan untuk meminimalkan potensi korupsi di kalangan kader dan pengurus partai. Ini mencakup aturan etika, mekanisme sanksi internal, serta sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbasis pada integritas dan kompetensi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran Partai NasDem dalam menjalankan fungsi edukasi politik kepada masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya korupsi, pentingnya integritas dalam memilih pemimpin, serta bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui kegiatan seperti diskusi publik, pelatihan politik, dan penyuluhan anti korupsi, partai politik dapat menjadi agen transformasi nilai dalam masyarakat.

Aspek penting lainnya yang menjadi fokus penelitian adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Partai NasDem terhadap perilaku kadernya, terutama mereka yang telah duduk dalam jabatan publik, baik legislatif maupun eksekutif. Penelitian ini akan menelusuri sejauh mana partai melakukan kontrol terhadap kader, termasuk tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran, serta efektivitas pengawasan tersebut dalam mencegah praktik korupsi.Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Partai NasDem berupaya menjadi bagian dari solusi atas persoalan korupsi yang kronis di Indonesia,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hafizh
Nomor mahasiswa	: E1051211007
Program Studi	: Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya sendiri bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar program studi, fakultas atau perguruan tinggi yang lain. Selama pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau pihak lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan pada daftar pustaka di dalam skripsi ini.

Pontianak,5 Mei 2025

Yang membuat Pernyataan



(Hafizh)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Satu garis takdir tidak mungkin ditulis oleh dua pena" Raim laode.

"Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.*PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit" Edwar satria.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua berkat-Nya, serta dukungan dan kasih sayang orang-orang tercinta, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, dengan rasa bangga dan bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri sendiri, karena telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta, ayah saya **Jhoy Ria Anggara** dan ibu saya **Winda,** yang **s**elalu memberikan ketenangan, kenyamanan,motivasi,doa terbaik,dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Saya mencintai kalian selalu dan kalian sangat berarti bagi saya.
3. Untuk saudariku, **Hafisa Januarti dan Hanisa Oktaviani** yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

4. Untuk teman-teman IPOL angkatan 21 dan sahabat-sahabat seperjuangan di perantauan yang selalu saling memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Sahabat dekat saya, **Izzuddin Al Ghifari** yang selalu memberi dukungan dan semangat dari awal masuk kuliah hingga penyusunan akhir skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul Peran Partai Nasional Demokrat Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai. Penulis menyadari, bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penggunaan kata-kata. Sehubungan dengan itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif agar kekurangan dan kelemahan dapat diatasi. Penulisan usulan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP,M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan sehingga dapat selesainya Proposal skripsi ini.
3. Syarifah Nurma Afhiani, M.S.Sos, selaku dosen pembimbing pendamping yang juga telah banyak memberikan bantuan, sehingga Proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Jumadi, S.S.Sos, M.Si selaku pembahas pertama yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini

5. Fuzy Firda Zhan, M.S.Sos selaku pembahas kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
7. Kepada Ketua Partai Nasional Demokrat DPD Kabupaten Sintang yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusun skripsi ini.
8. Kepada keluarga, Ayah dan Ibu, saudara beserta kerabat yang telah memberikan Dukungan berupa moril maupun material dari awal penulis mengenyam Pendidikan hingga saat ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya, Amin.

Pontianak,..... 2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN. ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

RINGKASAN SKRIPSI vi

PERNYATAAN KEASLIAN x

MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN. 1

1.1 Latar Belakang Penelitian.. 1

1.2 Identifikasi Masalah. 7

1.3 Fokus Penelitian. 7

1.4 Rumusan Masalah 8

1.5 Tujuan Penelitian. 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

1.6.1 Manfaat Teoritis 8

1.6.2 Manfaat Praktis 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

2.1 Definisi Konsep 10

2.1.1 Partai Politik 10
2.1.2 Prinsip Etika Politik Dalam Partai Politik 14
2.1.3 Tujuan Etika Politik dan Partai Politik 17
2.1.4 Fungsi Etika Politik dalam Partai Politik 17
2.2 Teori 18
2.2.1 Implikasi Dasar Moral Etika Politik 18
2.2.2 Hubungan antara dan Etika Politik 19
2.2.3 Peran Partai Nasdem dalam membangun Etika Politik 20
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 21
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Kerangka Pikir Penelitian 27
2.6 Pertanyaan Penelitian 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3.1 Tempat Penelitian 31
3.3.2 Waktu Penelitian 31
3.4 Objek dan Subjek Penelitian 32
3.4.1 Objek Penelitian 32
3.4.2 Subjek Penelitian 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 34

3.7 Teknik Analisa Data 34
3.8 Teknik Keabsahan Data 35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 37
4.1 Gambaran Umum Wilayah Peneliti 37
4.4.1 Sejarah Kabupaten Sintang 37
4.2 Letak Geografis Kabupaten Sintang 38
4.2.1 Keadaan Sosial Budaya 41
4.2.2 Visi dan Misi Kabupaten Sintang 41
4.2.3 Kondisi Pengembangan Ekonomi Wilayah 42
4.3 Gambaran Umum Partai Nasional Demokrat 45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
5.1 Hasil Penelitian 50
5.2 Pembahasan 51
5.2.1 Legitimasi Kekuasaan Politik 51
5.2.2 Keputusan Kebijakan Ketua Partai Nasional Demokrat DPD Kabupaten Sintang 55
5.2.3 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas 72
5.2.4 Partisipasi Demokrasi 78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 81
6.1 Kesimpulan 81
6.2 Saran 83
6.3 Keterbatasan Penelitian 85
DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Halaman

Waktu Penelitian 3.1 32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Kerangka Pikir 2.5 27

Gambar Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang 4.1.....42

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA I 89

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA II 90

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA III.....91

LAMPIRAN DOKUMENTASI I 92

LAMPIRAN DOKUMENTASI II.....93

LAMPIRAN DOKUMENTASI III.....94

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAD RAKERWIL 95

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT RAKERDA.....96

LAMPIRAN SURAT TUGAS 97

LAMPIRAN BIODATA PENELITI 98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut pandangan dengan berdasarkan falsafah Pancasila. Lima sila pada Pancasila merupakan filosofi negara atau Philosophische Grondslag Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahan negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan negara dan menjamin akan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih wakil rakyat nantinya. Demokrasi nantinya akan dijadikan pegangan oleh rakyat dalam menagih janji para pemegang tonggak kekuasaan agar dapat mengakui hak para rakyat dalam memilih wakil rakyat yang menurut mereka kompeten.

Indonesia mendukung penggunaan Masyarakat dan administrator negara harus mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai panduan dalam perilaku mereka. Indonesia telah menetapkan Pasal 22E dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk menjalankan praktik demokrasi. Tujuan dari pemilihan umum ini adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Pemilihan umum ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai cara bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil mereka. Sebelumnya, pemilihan umum diatur dalam beberapa undang-undang yang terpisah seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk penyelenggaraan pemilu.

Partai Nasional Demokrat, sebagai salah satu aktor penting dalam lanskap politik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong terciptanya etika politik yang sehat di masyarakat. Dengan visi yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi, Partai NasDem terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip etika politik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat. Penekanan Partai NasDem pada transparansi tercermin dari upayanya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan pada internal partai tetapi juga dalam tindakan-tindakan politik yang menyangkut kepentingan publik, memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sebagai pilar penting dalam pembangunan etika politik, langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, sehingga demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Konsep etika atau filsafat moral dapat diterapkan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Etika memberikan landasan moral bagi politik. Mengabaikan etika dalam kehidupan politik dapat mengarah pada praktik Machiavellian, dianggap sebagai politik di yang mana politik alat untuk mencapai segala hal, baik atau buruk, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku. Kebebasan manusia dapat diterima selama individu mampu mengembangkan pikiran tentang tujuan dan cara kehidupan mereka. Dalam konteks kehidupan politik, mengatur kehidupan politik dengan menjadikan etika sebagai dasar dapat menghasilkan politik yang memperhatikan aturan permainan dan memahami apa yang harus dilakukan serta apa yang harus dihindari.

Berdasarkan hal tersebut, dalam membangun etika politik Partai NasDem sebagai partai politik memiliki tanggung jawab dalam membentuk pandangan etis dan moral dalam kehidupan politik. Dengan mendasarkan diri pada etika, Partai Nasdem dapat menjadi pionir dalam mempromosikan politik yang bermoral dan berprinsip, memberikan kontribusi positif untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sikap, nilai, dan tindakan Partai NasDem dalam membentuk etika politik, serta dampaknya terhadap dinamika politik dan masyarakat.

AD/ART Partai NasDem mencantumkan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Pasal 12 mengenai keanggotaan, disebutkan bahwa anggota yang melanggar ketentuan

partai dapat diberhentikan. AD/ART Pasal 24 ayat (3) Anggota yang diberhentikan tetap dari keanggotaan partai dan sedang menjabat sebagai anggota legislatif, maka partai akan mengusulkan Pergantian Antar Wakti (PAW) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keanggotaan AD/ART Pasal 11 & AD\ART Pasal 12-15, Terbukti melakukan tindakan pidana berat atau merugikan nama baik partai. Proses rekrutmen anggota dalam Partai NasDem juga diatur secara ketat dalam AD/ART. Hal ini menunjukkan bahwa partai memiliki mekanisme untuk menegakkan disiplin dan etika di antara anggotanya, termasuk tindakan korupsi. Proses rekrutmen anggota dalam Partai NasDem juga diatur secara ketat dalam AD/ART. Setiap calon pejabat politik harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang dapat mewakili partai dalam posisi publik Selain itu, partai juga menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap anggota yang menjabat di posisi strategis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Penegakan kode etik ini bertujuan untuk menjaga citra partai serta mendorong anggota untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Partai NasDem.

Di Tengah maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene sebagian besar berasal dari kader-kader partai politik sudah sewajarnya partai politik (parpol) berperan aktif dalam tindakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Diketahui bersama, Anggota

DPRD Sintang, Zulherman telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Ketungau II. Salah satu kader Partai NasDem yang mempunyai jabatan di DPRD Kabupaten sintang(Suara Pemred Kalbar, 2024). Salah satu Praktisi Hukum menanyakan ke ketua DPRD dan Bupati kabupaten sintang pada tanggal 29 Februari 2024((Suara Pemred Kalbar, 2024). Tidak ada pemberhentian kepada pelaku Tindakan korupsi Zulherman selaku ketua komisi D. Partai NasDem tidak melakukan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Kepada Zulherman hanya sanksi yang diberikan penurunan jabatan dari ketua komisi D, Menjadi anggota di komisi D.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan Bupati Sintang, tidak mendukung pemberantasan korupsi, karena baru 2024 ada usulan PAW terhadap Zulherman yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jembatan Ketungau II," (Suara Pemred Kalbar, 2024). Dalam hal tersebut kurang dukungan untuk Tindakan permasalahan ini dari pemerintahan untuk tindak lanjut korupsi Zulherman. Selaku Ketua DPRD Ronny Mengatakan “Saya harap masalah Zulherman, dapat jadi bahan pelajaran bagi semua anggota DPRD Kabupaten Sintang, jaga dan junjung tinggi etika profesi,” kata Florensius Ronny(Kurniawan,2023). Sudah mengatakan akan junjung tinggi etika organisasi profesi tapi dengan kenyataan tidak ada kelanjutan atau pemberhentian hingga masa jabatan zulherman habis selaku Anggota Dewan dan dari partai NasDem tindak mengusulkan pergantian anggota dewan dari Partai.

Peran Partai Nasional Demokrat terhadap membangun etika Partai belum maksimal dalam menjalankan AD/ART Partai, Mereka berkomitmen untuk membangun politik yang demokratis dan berkeadilan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya melawan korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan di Indonesia. Dengan kasus ini seharusnya Partai mengambil Tindakan yang seharusnya dikomitmenkan oleh Partai sesuai dengan aturan yang berlaku tapi di lihat dari kasus ini tidak ada Tindakan dari Partai. Harus diproses di Komisi Kode Etik DPRD Kabupaten Sintang. Jangan kepentingan pribadi dibawa-bawa dalam jabatan Ini bahaya, Tidak bisa dibiarkan(Kurniawan,2023).

Dalam Pasal 126 ayat (2) 'Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian di dalam ayat (3) "Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD (Suara Pemred Kalbar, 2024). Dengan ini seharusnya sudah di usulkan pergantian anggota dewan dari Partai NasDem, dalam kasus ini "DPRD Kabupaten Sintang dan Bupati Sintang, tidak mendukung pemberantasan korupsi, karena baru 2024 ada usulan PAW terhadap Zulherman(Suara Pemred Kalbar, 2024).

Dalam latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran partai, dalam

menerapkan AD/ART dan etika organisasi partai terhadap anggota partai politik yang melanggar aturan yang tidak kunjung di Pelantikan Pergantian Antar Waktu sama partai terhadap anggota yang melakukan tindakan korupsi dalam judul penelitian "Peran Partai Nasional Demokrat Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai Studi Kasus Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang "

1.2.Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut yang akan diteliti dalam penelitian ini. Identifikasi masalah ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi acuan kajian. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Adanya indikasi pelanggaran prinsip moral dasar yang dilakukan oleh salah satu anggota partai dalam menerapkan etika politik di Kabupaten Sintang.
2. Tidak adanya keberlanjutan penegakan kebijakan dalam prinsip etika politik pada Partai NasDem di Kabupaten Sintang.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan penelitian kualitatif ini pada dasarnya terdapat di tingkat kepentingan urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada "Peran partai Nasional Demokrat Dalam

Penegakan Etika Organisasi Partai Studi Kasus Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah: ”Bagaimana Peran Partai Nasional Demokrat Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai Studi Kasus Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang”.?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Partai NasDem Dalam Penegakan Etika Organisasi Partai Studi Kasus Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Sintang”

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara akademisi mampu menjadi referensi ilmiah dalam rangka Memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran terhadap Ilmu Politik khususnya kajian partai politik dan Pendidikan Anti Korupsi.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan kepada praktisi, pembaca bahwa partai dan pendidikan politik anti korupsi merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

3. Bagi Partai Nasional Demokrasi

Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan untuk meningkatkan kompetensi kader di DPD NasDem Kabupaten Sintang. Dengan fokus pada Peran partai NasDem dalam penegakan etika organisasi partai, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam konsolidasi dan pengembangan kader di seluruh struktur organisasi partai.

4. Bagi Penulis

Melakukan penelitian sangat mendorong penulis untuk berpikir kritis dan analitis. Dalam belajar untuk mengevaluasi informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta mengembangkan argumen yang kuat berdasarkan bukti dan dapat belajar tentang partai politik.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat membantu mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat, seperti masalah Politik dan isu-isu korupsi yang terjadi dari tingkat kabupaten hingga Nasional. Dengan data yang akurat, kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif dan tidak dapat berita Hoax.